

## Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam

### **Ketukan Palu Hakim Agung Artidjo Alkostar yang Ditakuti Koruptor**

Buku ini akan menjelaskan dasar atau alasan apa saja yang dapat dibenarkan agar dapat dibatalkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan adanya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, mengingat bagaimana upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dunia kecuali kebenaran yang ditentukan oleh Tuhan, oleh bukan hanya kebenaran yang diputuskan oleh hakim. Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan kebenaran yang tidak mutlak, dimana apabila terdapat bukti baru maupun alasan-alasan yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang, yang dapat mematahkan kebenaran/fakta hukum yang telah diputus oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dimintai pembatalan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Indonesia has a growing population of almost 300 million people, it is increasingly involved in world affairs, and has a booming economy. The need to better understand its unique, complex, and often obscure legal system, has become pressing. This is true across a wide range of sectors including, but not limited to, trade and investment, crime and terrorism, and human rights. Indonesia's democratization after the fall of Soeharto in 1998 triggered massive social and political changes that opened up this diverse, and formerly tightly-controlled, society. Law reform was a key driver of Indonesia's transformation and its full effect remains to be seen. This book offers clear and detailed explanations of the foundations of Indonesia's legal system in the context of its legal reform and rapid development. It offers succinct commentaries on a wide range of issues, examining the judicial process, the constitution, corruption and the court system, contract law, administrative law, foreign investment, taxation, Islamic law, and family law. It examines current substantive law and judicial interpretation and presents case studies of how the system operates in practice. Written in an accessible and engaging style, this book is an essential guide for readers seeking quick and clear answers to questions regarding the law and its application in Indonesia.

### **Tommy Soeharto dalam Kasus Bulog**

Warta ekonomi

Tempo

mingguan berita ekonomi & bisnis

### **Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

#### **Indonesian Law**

Pada umumnya mahasiswa akhir ini kesulitan dalam menyelesaikan skripsi maupun tesis. Meskipun sebelumnya mereka telah menerima mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Pada matakuliah tersebut sebenarnya diajarkan secara terperinci tentang menyusun skripsi atau tesis. Akan tetapi, jeda materi kuliah dengan penyusunan skripsi dan tesis relatif jauh (biasanya ada yang sampai satu tahun), maka mahasiswa "lupa" terhadap cara penyusunan skripsi atau tesis. Untuk itu, buku ini hadir sebagai salah satu upaya mempermudah mahasiswa dalam menyusun skripsi atau tesis. Buku ini memang dibuat sederhana mungkin dengan menghindari bahasa-bahasa penelitian yang dipersepsikan sulit. Sehingga buku ini bisa dianggap buku ilmiah populer. Harapan penulis, semoga kehadiran buku Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris ini menjadi bahan ajar yang dapat membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia

Kajian dalam buku ini berangkat dari sebuah fenomena ketidakadilan yang semakin masif. Peradilan—mulai tingkat pertama hingga kasasi—sebagai institusi untuk mewujudkan keadilan, 'mati suri' dengan mengeluarkan putusan-putusan yang tidak adil. Adagium putusan hakim tidak adil, adalah sebuah stigma yang menggejala dalam proses respons masyarakat. Adil kian absurd di saat peradilan meniadakan eksistensinya menjadi lebih buram dan abu-abu. Studi tentang putusan, khususnya putusan kasasi melibatkan seluruh dari tiga lapisan ilmu hukum yakni filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Setiap dari lapisan ini memberikan karakteristik analisisnya masing-masing. Hanya saja, nuansa filsafat hukumnya lebih kental dan mewarnai. Filsafat hukum sebagai metateori dari teori hukum dan mewarnai dogmatik hukum. Akhirnya, masih banyak yang kurang daripada lebihnya. Untuk itu, perlu autokritik dari semua pihak agar buku lebih sempurna. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Sebagai masalah hukum, politik uang dalam perspektif hukum Islam sulit dipisahkan dari pembahasan mengenai maqashid al-syariah karena maqashid al-syariah adalah tujuan daripada hukum Islam itu sendiri dan merupakan goal dari penerapan hukum Islam. Orientasi syariah Islam (maqashid al-syariah) yang hendak diwujudkan dalam bentuk masalah seperti hifzh al-aql (melindungi akal), hifzh al-mal (melindungi harta benda), hifzh al-arid (kehormatan diri) ternyata pada politik uang lebih banyak membawa kemudharatan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudharatannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara secara umum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Kisah Horor Robot Gedek Si Pemburu Anak-anak

Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia

Law Dictionary

Memudahkan Urusan Pajak Bagi Perorangan Suami Isteri Usaha Dan

Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi

Kepala daerah pilihan hakim

Taufiegurachman Ruki Menyingkap Pemberantasan Korupsi

Sebagian besar kalangan teoritis dan praktisi hukum masih memiliki persepsi bahwa lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum biasa atau upaya hukum keempat setelah upaya hukum kasasi, konstruksi pola berpikir para hakim agung yang ditunjuk sebagai majelis Peninjauan Kembali oleh sebagian para teoritis dan praktisi hukum juga dianggap masih sebagai yudex juris. Padahal lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa, ditangani dengan acara luar biasa, oleh Majelis Hakim PK yang luar biasa, karena hakim Agung yang selama ini sebagai yudex juris yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka sejak saat itu telah menjelma menjadi Hakim Yudex Facti yang memiliki kewenangan untuk menilai kualitas dan derajat pembuktian terhadap alat bukti baru yang dihadirkan dalam forum Majelis PK tersebut. Jadi, dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara PK, Hakim Agung Majelis PK harus memosisikan dirinya sebagai hakim yudex facti yang dituntut mampu mengerahkan segala pengetahuan dan kemampuan teknisnya, kemudian melakukan analisis secara induktif terhadap alat bukti, melakukan kualifikasi dan penilaian terhadap alat bukti, serta mampu berjuang secara sungguh-sungguh mempertemukan, mendamaikan, dan mengharmonisasikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (Inkracht van gewijsde) sebagai data primer yang harus dihargai sebagai data yang memiliki kualifikasi kepastian hukum. Sementara alat bukti baru Novum harus dipandang sebagai data primer yang memiliki dimensi keadilan hukum dengan sengaja dihadirkan untuk menuntut ditegakkannya keadilan, maka di sinilah Majelis Hakim PK dituntut mampu mengharmonisasikan keduanya dalam putusan PK. \*\*\* Persembahan penerbit Kencana

(Prenadamedia Group)

News magazine.

Fenomena kejahatan kekerasan menunjukkan kejahatan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya motif. Namun dalam kerangka RCT (rational choice theory) dan RAT (routine activity theory), fenomena ini tidaklah demikian. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pertimbangan rasional dari pelaku kejahatan. Dengan kata lain, RCT dan RAT menegaskan bahwa kejahatan kekerasan pasti memiliki motif, apa pun itu. Benar bahwa salah satu tujuan pelaku adalah mengharapkan atau menciptakan situasi atau kondisi yang lebih menyenangkan, lebih mengesankan, atau lebih memudahkan. Benar pula bahwa hal tersebut bersifat perseptual. Namun jika dilihat dari teori RCT dan RAT, mengharapkan atau menciptakan situasi atau kondisi yang lebih menyenangkan, lebih mengesankan, atau lebih memudahkan adalah sesuatu yang nyata dan diungkapkan oleh pelaku.

- Menjelaskan manajemen perpajakan perusahaan atau pengusaha yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta cara menganalisis laporan keuangan dan pelaporan pajak agar tidak terjadi pemborosan kas dan waktu yang seharusnya tidak ditanggung. - Juga diuraikan kasus-kasus perpajakan dari pelaporan pajak yang terjadi pada masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang sehingga tidak menimbulkan bola salju masalah dan beban perpajakan. - Contoh analisis kasus manajemen perpajakan PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pot/Put, PPN, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah dan pemeriksaan serta memberikan solusinya. - Buku Manajemen dan Analisis Perpajakan Memudahkan Urusan Pajak ini diharapkan dapat dijadikan pegangan yang mudah dan praktis bagi masyarakat khususnya wajib pajak, manajemen perusahaan, pengusaha, konsultan, aparatur pajak, peneliti, pengamat perpajakan, mahasiswa di setiap strata maupun pasca sarjana serta dosen. Semoga buku ini bermanfaat sebagai literatur dunia praktisi dan akademis sebagai referensi. Kepada para pimpinan dan rekan kerja dosen di Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Negeri Udayana Bali, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPak) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, STEKPI Jakarta, Universitas Mpu Tantular Jakarta, Universitas Pakuan Bogor, LP3I Denpasar Bali, seluruh rekan kerja di Direktorat Jenderal Pajak, Rekan Kantor Akuntan Publik Drs. Tasnim Ali Widjanarko, PT Riau Andalan Pulp Paper (RAPP)

Tommy Soeharto dalam Kasus Bulog

Indonesia, Singapore and Vietnam

Gatra

Tinjauan Teoretis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta

Ekonomi Politik Pembangunan

Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical

Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

**Taufiequrachman Ruki Menyingkap Pemberantasan Korupsi**

**Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali Kencana**

Dalam buku ini, penulis mencoba mengkritisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan, di mana dengan adanya kasus Prita Mulyasari, penulis merasa bahwa formulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut perlu diperbaiki sehingga menjamin adanya kepastian hukum serta keadilan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian yang dilakukan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana. Penulis menyadari bahwa selesainya buku ini tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama orang-orang di sekitar yang telah dan selalu memberikan semangat, bimbingan, motivasi, serta bantuan baik materil/imateril. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis yang berjudul "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang I.T.E (Suatu Analisis Putusan Pengadilan Kasus Prita Mulyasari)". Ada kebutuhan dunia hukum, maka buku ini hadir ikut memberikan sumbangsih bagi supremasi hukum di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadikan aktivitas masyarakat Indonesia di dunia cyber menjadi harus lebih hati-hati karena ada begitu banyak perbuatan yang dapat dikriminalisasi. Salah satu perbuatan yang dikriminalisasi dalam UU ITE tersebut adalah delik/tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Namun dalam penerapan hukumnya, formulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering mengalami masalah terkait rumusan pasal yang dinilai tidak menjamin adanya kepastian hukum serta keadilan, karena rumusan norma dalam pasal tersebut masih sering ditafsirkan secara berbeda di kalangan penegak hukum dan mengakibatkan penerapan hukum yang salah. Permasalahan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pertama kali terjadi pada kasus Prita Mulyasari tahun 2009 yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut terlihat ketika beberapa lembaga Pengadilan (Pengadilan Negeri, MA-Kasasi dan MA-PK) yang memeriksa dan memutus kasus ini memiliki pertimbangan dan pendapat yang berbeda yang berakibat pada penjatuhan putusan yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadikan penulis tertarik untuk membuat penelitian dan mengkritisi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan menggunakan sarana/pendekatan kebijakan hukum pidana, agar dapat menemukan kelemahan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan seterusnya dapat dilakukan upaya pembaharuan hukum. Atas proses tersebut, maka lahirnya buku yang Anda baca ini. Judul: Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Penulis: Ernest Sengi, SH., MH Editor: Usak, M.H dan Jefrey Oxianus Sabarua, M.Pd ISBN: 978-602-51368-5-6 Cetakan: I, 2018 Tebal: 21 x 14 cm, xii + 168 Halaman Diterbitkan: CV. Pilar Nusantara Harga: Rp 50.000 (belum termasuk ongkir) Distributor: (024) 76423442 / 08562674799 Email : pilarnusapress@gmail.com Proses pemeriksaan sengketa melalui arbitrase mulai dari pendaftaran, pembuktian dalam persidangan sampai dengan pengambilan putusan diakui oleh para pelaku bisnis lebih cepat daripada penyelesaian perkara melalui litigasi lembaga pengadilan, namun demikian ketika sampai tahap pelaksanaan putusan arbitrase yang telah dikenal mempunyai sifat final and binding, ternyata belum bisa langsung dilaksanakan karena terdapat ketentuan yang memberi kesempatan kepada pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase maupun perlawanan pelaksanaan putusan, yang berakibat pihak yang menang harus bersabar menunggu sampai upaya hukum yang diajukan selesai diperiksa dan diputus dalam proses pemeriksaan yang membutuhkan waktu cukup lama. Keadaan ini dikhawatirkan akan menjadikan keberadaan lembaga arbitrase kehilangan kepercayaan dari para pelaku bisnis untuk menikmati kemenangan dalam penyelesaian sengketa mereka yang selama ini dinikmati karena dinilai dan diharapkan lebih cepat ternyata menjadi lambat. Untuk mengatasi pelaksanaan putusan yang diajukan pembatalan dan atau perlawanan tersebut, buku ini memberikan gambaran solusi singkat bagaimana melaksanakan putusan arbitrase yang mempunyai kekuatan final and binding, yakni putusan yang mengikat dan merupakan putusan akhir yang semestinya dapat dilaksanakan sesuai dengan asas pemeriksaan persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Buku Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis berfokus pada putusan arbitrase dengan segala permasalahan serta pemecahannya.

**Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia**

**Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris**

**bersaksi dalam advokasi irigasi**

**Readings in Legal Philosophy**

**The Crime of Aggression**

Membaca buku ini akan nampak adanya kegalauan Penulis karya tulis buku ini antara harapan, optimisme dan kecemasan Penulis tentang ketidak pastian masa depan pertanggungjawaban korporasi, dan Korporasi sebagai subjek Hukum Pidana yang selama ini leluasa melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi sulit dimintai pertanggungjawabannya di Psengadilan karena ketiadaan hukum acara yang mengatur. Masalah-masalah yang dibahas dalam buku ini, adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pertanggung jawaban korporasi terkait tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana implementasi pertanggung jawaban korporasi terkait tindak pidana korupsi dalam mewujudkan kepastian hukum?

Dalam rentang sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, ada demikian banyak kasus yang menyita perhatian publik sekaligus menghabiskan energi bangsa ini. Sebut saja kasus Texmaco, Dipasena, dan Asian Agri, perusahaan-perusahaan raksasa yang terjerat pelanggaran pidana kelas kakap dan akhirnya harus bertempur selama bertahun-tahun di pengadilan. Mereka yang terlibat dalam kasus tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan mendekam di balik teralis besi penjara. tetapi, rentetan proses hukum tersebut juga menimbulkan pertanyaan baru: apakah keadilan sudah tercapai dengan dihukumnya para terdakwa? Bagaimana dengan kerugian nonhukum seperti aset yang terbengkalai menjadi besi tua, ribuan karyawan yang di-PHK dan harus berjuang mempertahankan hidup mereka, kerugian negara yang justru tak bisa kembali? Apakah efek tersebut tidak masuk dalam keadilan yang dituju oleh hukum pidana? Buku persembahkan penerbit PrenadaMedia

"This book will be of value to those just starting in credit Analysis field as well as to experienced analysts. A must for all student and practitioners." -- Ivan Atmaja, General Manager, Metropolitan Bank & Trust Company, New York, USA.

"Ditulis dengan uraian yang sederhana dan mudah dipahami namun berisi uraian yang cukup lengkap mengenai analisis perkreditan. Suatu referensi yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin mempelajari perkreditan secara mendalam." -- Subur Tan, Direktur PT Bank Central Asia, Tbk.

"Buku ini sangat bermanfaat untuk praktisi dalam bidang keuangan maupun bidang non-keuangan, karena Pak Tohir menulisnya dengan simple dan mudah dimengerti." --

Darwin Yuwono, CFS, Direktur Of Equities Sales, PT Credit Suisse Securities. "Kualitas kredit suatu bank sangat bergantung dari kualitas analisis kreditnya Buku ini ditulis oleh seorang praktisi analisis kredit yang saya kenal pernah menangani kredit yang sederhana sampai kredit korporasi yang rumit, Pengalaman yang tertuang dalam buku ini berupa teori dan praktik lapangan pantas dibaca bagi para analisis yang ingin mendalami bidang kerjanya. Selamat dan Sukses kepada Pak Tohir" -- Amirdin Halim, Direktur BCA Finance.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 21 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik " Posisi dan Teori Dasarnya " yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia. Penyebutan kata " sektor " menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekuensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen. Dengan diterbitkan buku ini, kami penyunting mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam buku ini dan juga penerbit yang telah membantu proses penerbitan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembelajaran, pengembangan, pemahaman, dan menjadi inspirasi untuk terbitnya buku-buku berikutnya.

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi

A Study of Institutional Collapse

Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali

Panduan Lengkap Menjadi Account Officer - Edisi Revisi

Kisah Horor Robot Gedek Si Pemburu Anak-anak

DELIK AGAMA

Sejak tahun 1883 berdasarkan konvensi Paris (1967) yang merupakan cikal bakal pengaturan perlindungan hukum sebagai kekayaan intelektual termasuk merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat terhadap kekayaan intelektual secara internasional, dalam buku ini pengaturan perlindungan merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat dapat tempat untuk dianalisis secara mendalam dalam 8 bab: BAB 1. Pendahuluan; BAB 2. beberapa pengertian dasar tentang hal kekayaan intelektual (HKI); BAB 3. tinjauan tentang merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, persaingan usaha tidak sehat dan prinsip etikad baik; BAB 4. perkembangan perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis sebelum dan pasca berlakunya Perjanjian TRIP's; BAB 5. beberapa kasus pelanggaran merek dan analisis kasus perlindungan merek terkenal; BAB 6. lembaga passing off dan dilution perbandingan hukum pada sistem hukum Anglo Saxon; BAB 7. konsep hukum perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terhadap persaingan usaha tidak sehat sebagai sarana penunjang pertumbuhan ekonomi nasional; BAB 8. Penutup: Kesimpulan dan Saran

Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia investigates criminal law and practice relevant to drugs regulation in three Southeast Asian jurisdictions: Indonesia, Singapore and Vietnam. These jurisdictions represent a spectrum of approaches to drug regulation in Southeast Asia, highlighting differences in practice between civil and common law countries, and between liberal and authoritarian states. This book offers the first major English language empirical investigation and comparative analysis of regulation, jurisprudence, court procedure, and practices relating to drugs law enforcement in these three states.

Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis This book is in English and Indonesian = Buku ini Berbahasa Inggris dan Indonesia

Controversy on the local government election in Depok, Jawa Barat Province on June 26, 2006.

Analisis CSIS.

Tempo interaktif

ISU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK

The Quest for Justice in an Age of Drones, Cyberattacks, Insurgents, and Autocrats  
Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat  
Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis

### **Melihat Kehidupan Tommy Soeharto Di Penjara**

**Since its first publication in 1996, Law and Morality has filled a long-standing need for a contemporary Canadian textbook in the philosophy of law. Now in its third edition, this anthology has been thoroughly revised and updated, and includes new chapters on equality, judicial review, and terrorism and the rule of law. The volume begins with essays that explore general questions about morality and law, surveying the traditional literature on legal positivism and contemporary debates about the connection between law and morality. These essays explore the tensions between law as a protector of individual liberty and as a tool of democratic self-rule, and introduce debates about adjudication and the contribution of feminist approaches to the philosophy of law. New material on the Chinese Canadian head tax case is also featured. The second part of Law and Morality deals with philosophical questions as they apply to contemporary issues. Excerpts from judicial decisions as well as essays by practicing lawyers are included to provide theoretically informed legal analyses of the issues. Striking a balance between practical and more analytic, philosophical approaches, the volume's treatment of the philosophy of law as a branch of political philosophy enables students to understand law in its function as a social institution. Law and Morality has proved to be an essential text in both departments of philosophy and faculties of law and this latest edition brings the debates fully up to date, filling gaps in the previous editions and adding to the array of contemporary issues previously covered.**

**Tuntutan hukum kepada dokter yang diajukan oleh pasien atau keluarga pasien atau kuasa hukum pasien saat ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Gugatan hukum kepada dokter tersebut dapat berupa tuntutan pidana dan atau perdata. Melihat situasi meningkatnya sengketa medis setiap tahunnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pernah mewacanakan kepada pemerintah agar dapat dibentuknya suatu pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa medis, oleh penulis hal ini menjadi sesuatu yang menarik, sebab proses penyelesaian sengketa medis yang terjadi antara dokter dengan pasien hingga saat ini masih diselesaikan melalui peradilan umum, juga melihat dari peranan penegak hukum dalam hal ini Jaksa dalam mengajukan tuntutan dan Hakim dalam menetapkan putusan pada perkara sengketa medis, karena masih banyak ditemukan kekurangpahaman pada kasus sengketa medis dan proses pembuktian, apakah telah sesuai dengan prosedur atau standar prosedur operasional dalam upaya menolong pasien. Pembentukan Pengadilan Khusus Medis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.**

**Pengertian Ekonomi Politik Pembangunan mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai adanya fenomena sosial atau ekonomi yang sulit kadang tidak bisa dijelaskan menggunakan ilmu ekonomi, sehingga perlu meminjam ilmu lainnya. Kondisi ini bisa terlihat bahwa dalam teori ekonomi dijelaskan permintaan tetap barang bertambah harga akan turun (hukum ekonomi) tetapi dalam fenomena kehidupan sehari-hari kita hukum tersebut sering tidak berlaku, misalnya kasus rumah mewah dsb. Untuk bisa memahami hal tersebut perlu meminjam pemahaman dari ilmu politik.**

**Pemahaman-pemahaman yang seperti itu yang akan dipelajari dalam ekonomi politik.**

### **Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia**

**Ketukan Palu Hakim Agung Artidjo Alkostar yang Ditakuti Koruptor**

### **BUNGA RAMPAI AKUNTANSI PUBLIK**

**Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim**

### **Analisis sosial**

### **Melihat Kehidupan Tommy Soeharto Di Penjara**

A gripping behind-the-scenes account of the dramatic legal fight to hold leaders personally responsible for aggressive war On July 17, 2018, starting an unjust war became a prosecutable international crime alongside genocide, crimes against humanity, and war crimes. Instead of collective state responsibility, our leaders are now personally subject to indictment for crimes of aggression, from invasions and preemptions to drone strikes and cyberattacks. The Crime of Aggression is Noah Weisbord's riveting insider's account of the high-stakes legal fight to enact this historic legislation and hold politicians accountable for the wars they start. Weisbord, a key drafter of the law for the International Criminal Court, takes readers behind the scenes of one of the most consequential legal dramas in modern international diplomacy. Drawing on in-depth interviews and his own invaluable insights, he sheds critical light on the motivations of the prosecutors, diplomats, and military strategists who championed the fledgling prohibition on unjust war—and those who tried to sink it. He untangles the complex history behind the measure, tracing how the crime of aggression was born at the Nuremberg trials only to fall dormant during the Cold War, and he draws lessons from such pivotal events as the collapse of the League of Nations, the rise of the United Nations, September 11, and the war on terror. The power to try leaders for unjust war holds untold promise for the international order, but also great risk. In this incisive and vitally important book, Weisbord explains how judges in such cases can balance the imperatives of justice and peace, and how the fair prosecution of aggression can humanize modern statecraft.

Banyak cara untuk memajukan ilmu hukum, termasuk menerbitkan karya tulis Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. dengan judul: Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara Tak ada yang meragukan perlunya buku semacam ini sebagai sebuah bahan acuan, pembanding, pedoman dan sumber bagi para hakim pada lingkungan peradilan dan dapat pula membantu semua pihak terutama dari kalangan akademisi, teoritis, praktisi dan lain-lainnya yang ingin lebih mendalami secara intens, detail dan terperinci tentang Yurisprudensi Tata Usaha Negara yang digunakan sebagai sarana hukum untuk pembangunan Hukum Administrasi Negara dan yurisprudensi putusan pengadilan tata usaha negara. Tema-tema sentral utama yang dibahas dalam buku ini mencakup: Kerangka Konseptual dan Pembangunan Hukum Nasional; Pemberdayaan Putusan Pengadilan dalam Pembangunan Hukum Nasional; Hukum Administrasi Negara dan

Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Pemberdayaan Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Pembangunan Hukum Administrasi Negara.

Since the fall of Indonesian president Suharto, a major focus of the country's reformers has been the corrupt and inefficient judicial system. Within the context of a history of the Supreme Court in post-independence Indonesia, Sebastiaan Pompe analyzes the causes of the judiciary's failure over the last five decades. This study provides an essential background for those seeking to understand why legal reform has been so slow and frustrating in the post-1998 period.

Polemik Hukuman Mati Versi Pemerintah Dan Pemerhati Hak Asasi

Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara

Fikih Korupsi

Mimbar Hukum

The Indonesian Supreme Court

Jurnal hukum bisnis

membongkar kontroversi pilkada Depok

*Delik agama merupakan delik yang menyita perhatian masyarakat karena berkaitan erat dengan agama sekaligus kerukunan umat beragama. Pemahaman konsep delik agama tidak boleh dilepaskan dari pemahaman kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks keindonesiaan. Delik agama kerap kali dipahami sebatas pengekangan kebebasan beragama padahal tidaklah demikian adanya. Kebutuhan akan pemahaman delik agama secara utuh baik dari konsep, batasan dan kajian analisis hukum semakin mendesak. Buku Ajar ini menjadi jawaban bagi kebutuhan literatur ajar yang secara utuh membahas konsep kebebasan beragama dalam kaitan dengan delik agama. Pemaparan materi pada tiap bahasan didasarkan pada perkembangan materi yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang terkait terutama materi delik agama kekinian disertai teori dasar dan kekinian. Buku ajar ini mendukung pengajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada mata kuliah Hukum Pidana dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Alhasil mahasiswa akan mendapatkan pemahaman secara utuh baik dari sisi konsep, regulasi maupun keterampilan berpikir dalam memecahkan kasus delik agama yang terjadi.*

Polemik Hukuman Mati Versi Pemerintah Dan Pemerhati Hak Asasi

Konsep, Batasan dan Studi Kasus

Pembentukan Pengadilan Khusus Medis

Law and Morality